

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM WARTAWAN DENGAN MODUS PELIPUTAN BERITA (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2024/PN Met)

**Oleh:
Aulia Arnelita**

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita hal ini sering kali melibatkan penggunaan ancaman dan intimidasi untuk mendapatkan uang dari individu atau lembaga. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan menyalahgunakan profesi mereka untuk keuntungan pribadi. Permasalahan ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik pada Polres Kota Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Metro, Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama tahap formulasi yaitu regulasi mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita yang dapat dikenakan dengan Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sedangkan pada tahap aplikasi aparat penegak hukum menerapkan dakwaan berbentuk alternatif yakni pada pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada

Aulia Arnelita

tahap eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met) memidana terdakwa dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita, yaitu faktor pertama adalah faktor penegak hukum yang mana dalam hal ini adanya ketidak kooperatifnya salah satu saksi yang mana harus dilakukan penangkapan oleh penegak hukum pada akhirnya. Faktor kedua pemasyarakatan, dimana adanya ketidaktahuan dan rendahnya pengetahuan tentang hukum, dan pengaduan hukum sehingga sulit dilakukan penegakan hukum yang baik.

Saran yang perlu disampaikan hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik dan memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum. serta masyarakat yang sudah menjadi korban tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan modus peliputan berita hendaknya segera melapor untuk membantu proses penegakan hukum.

Kata kunci: Penegakan , Pemerasan, Berita.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL ACTS OF EXTORTION BY JOURNALISTS WITH THE MODUS OF NEWS COVERAGE

(Study of Decision Number: 40/Pid.Sus/2024/PN Met)

**Oleh
Aulia Arnelita**

The crime of extortion committed by certain journalists under the guise of news coverage often involves the use of threats and intimidation to obtain money from individuals or institutions. These cases show how some people who claim to be journalists abuse their profession for personal gain. The problem is how to enforce criminal law against the crime of extortion committed by certain journalists under the guise of news coverage and what are the factors that hinder the enforcement of criminal law against the crime of extortion committed by certain journalists under the guise of news coverage.

The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The sources in this study are investigators at the Metro City Police, Prosecutors at the Metro City District Attorney's Office, Judges at the Metro City District Court and Lecturers in Criminal Law at the University of Lampung. While the data processing obtained by data selection, data classification and data systematization. Data analysis uses qualitative analysis.

he defendant with a prison sentence of 9 (nine) months and a fine of Rp3,000,000.00 (three million rupiah). Factors that inhibit the crime of extortion committed by journalists with the mode of news coverage, namely the first factor is the law enforcement factor in which in this case there is the uncooperativeness of one of the witnesses which must be arrested by law enforcement in the end. The second factor is the community, where there is ignorance and low knowledge of the law, and legal complaints so that it is difficult to enforce the law properly.

Aulia Arnelita

The suggestion that needs to be conveyed is that the related agencies should work together to coordinate well and provide socialization or counseling related to the crime of extortion committed by certain journalists so that the public has legal awareness. And the public who have become victims of the crime of extortion committed by certain journalists with the mode of news coverage should immediately report to help the law enforcement process.

Keyword: Enforcement , Extortion, News.